

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM DAN MELAYU

Oleh: Akbarizan

(Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau)

Abstrak

Islam is with a set of point that be taken in tries to do one process " revolution " to human view about woman at world. Gently ala but must, Syari ' at Islam begins to lift womankind of continuous discriminatory wallow at Arabic society. woman in monographic Islamic in fact reputed have there rights with man clan, having poised the right and obligation good deep spritual's state, moral, right for economic rights and right for rights legal in jurisdictional view

Keywords: *Kepemimpinan, Perempuan, Islam, Melayu*

Pendahuluan

Islam memposisikan diri sebagai sebuah ajaran yang secara substansial membawa misi keadilan universal. Keadilan dalam Islam merupakan sesuatu yang cukup penting dan mendasar. Prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak dasar manusia (*human right*) dipelihara dan diajarkan secara serius dan konsisten. Ajaran Islam menempatkan keadilan dalam semua aspek termasuk hak-hak dan kewajiban antara laki-laki dan wanita. Memang diakui bahwa ada yang menuduh Islam memiliki bias gender dalam beberapa hal, seperti dalam kesaksian,¹ warisan,² dan kepemimpinan³. Ulama juga memiliki perbedaan pendapat tentang kepemimpinan wanita.

Polemik ini bisa dimengerti karena menurut mereka (ulama) baik secara historis, antropologis, sosiologis dan bahkan nash-nash normatif, wanita dipandang punya banyak sisi kelemahan apabila dihadapkan pada hal-hal yang berkaitan dengan tugas seorang pemimpin.

Tulisan ini tidak berkeinginan untuk melakukan penolakan terhadap gagasan kesetaraan gender yang –salah satunya– kini tengah dilakukan oleh banyak organisasi-organisasi kewanitaan, akan tetapi semata-mata ingin mengkaji secara ilmiah landasan filosofis dan sosiologis, mengapa kalangan ulama fiqh mempersoalkan keabsahan wanita sebagai pemimpin, sebab diduga kuat para ulama banyak diilhami oleh pengalaman-pengalaman pahit tentang wanita dan kondisi sosialnya ketika menentukan pendapatnya tentang pemimpin wanita.

Pembicaraan tentang pemberdayaan kaum wanita dalam perkembangan pemikiran, sepertinya merupakan proses klimaks dari perjalanan pahit kaum wanita

di masa lalu di belahan dunia manapun. Era pra Islam misalnya, dengan mengamati salah satu kasus kaum wanita di kota Athena, Yunani mengalami perlakuan yang sangat buruk dan cenderung sangat diskriminatif. Wanita pada zaman itu dianggapnya sebagai hewan yang dengan mudah dapat diperjualbelikan, sama sekali tidak diberi hak untuk mengelola kakayaan yang ia miliki, wanita dalam pandangan hukum Yunani waktu itu dipandang hanya sebatas sebagai “pembantu rumah tangga” dengan tugas tunggal melahirkan anak. Kesucian mereka sedemikian terperosok lebih rendah dari hewan dan bahkan disejajarkan dengan najis dan perbuatan syetan, ketika tidak lagi dibutuhkan kaum lelaki. Situasi seperti ini dialami hampir oleh semua wanita, termasuk masyarakat Arab pra Islam, khususnya ketika Islam belum datang membawa misinya.

Islam dengan seperangkat nilai yang dibawanya mencoba melakukan sebuah proses “revolusi” terhadap pandangan manusia tentang wanita di dunia. Secara perlahan tapi pasti, Syari’at Islam mulai mengangkat kaum wanita dari kubangan diskriminatif yang berkepanjangan di masyarakat Arab. wanita dalam risalah Islam sesungguhnya dianggap memiliki hak yang dengan kaum pria, memiliki hak dan kewajiban yang seimbang baik dalam status spritual, moral, hak-hak ekonomis dan hak-hak legal dalam pandangan hukum.

Kepemimpinan Wanita Menurut Hukum Islam

Kedudukan wanita dalam Islam dalam perkembangan Islam sebenarnya sudah mengalami pencerahan yang cukup signifikan. Polemik para ulama dalam kapasitas wanita sebagai pemimpin juga berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, dan struktur masyarakat tertentu yang diduga kuat mempunyai andil cukup besar terhadap pemikiran ulama dalam memandang kedudukan wanita sebagai pemimpin. Disamping itu persoalan-persoalan yang berat yang dihadapi masih dianggap sesuatu yang riskan jika harus diserahkan pada wanita. Itulah sebabnya para ulama fiqh telah melakukan usaha maksimal untuk membuat kualifikasi formal bagi seorang pemimpin.

Kepemimpinan yang berkualitas sepertinya disepakati oleh ulama diserahkan kepada laki-laki.⁴ Secara normatif, ulama ulama fiqh klasik misalnya telah membuat persyaratan yang cukup selektif untuk seorang pemimpin antara lain, Islam, merdeka, laki-laki, mukallaf, ‘adil, mendengar, bisa berbicara fasih, bisa menulis dan yang terpenting tentunya punya integritas moral dan menguasai syari’at Islam. Konsekuensi logis dari persyaratan ini, maka calon calon pemimpin yang tidak memiliki kriteria tidak dianggap cukup sah status kepemimpinannya. Karena salah satu syarat itu juga harus laki-laki, maka apabila wanita menjadi pemimpin, keabsahannya tidak bisa dipertanggung jawabkan secara legal.

Terlepas dari kutipan salah seorang ulama di atas tentang keabsahan seorang pemimpin wanita, penulis ini ingin memaparkan lebih jauh bagaimana polemik dan

komentar serta argumentasi yang digunakan para ulama lain tentang keabsahan pemimpin wanita. Menurut penulis, sekurang kurangnya ada tiga kelompok ulama yang menyatakan pendapatnya berkaitan dengan hal tersebut, yaitu: *pertama*, wanita tidak boleh menjadi pemimpin, pendapat ini diwakili oleh tokoh madzhab terkenal seperti, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad Ibnu Hanbal. *Kedua*, wanita boleh menjadi pemimpin, apabila wanita tersebut memiliki kapabilitas dan kompetensi yang memadai pendapat ini diwakili oleh tokoh fiqh rasional, Imam Abu Hanifah.

Ketiga, wanita boleh menjadi pemimpin secara mutlak. Pendapat ini diwakili oleh imam Ibnu Jarir Al-Thabary. Sejalan dengan imam Thabary, imam Ibnu Hazm juga mengemukakan kebolehan wanita sebagai pemimpin secara mutlak.

Dari ketiga kelompok ulama yang memiliki pendapat berbeda tersebut masing-masing memiliki dalil-dalil baik dari nash-nash syari'at maupun aqli. Menurut catatan Muhammad Abu Al-'Ainaini, kelompok ulama yang meragukan keabsahan wanita sebagai pemimpin, seperti yang diwakili imam Malik dan Syafi'i, berpedoman pada teks al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَلْصَلِّحَتْ قُنُوتٌ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا⁵

Ulama kelompok ini menafsirkan, kata *فَضَّلَ* yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah berkaitan dengan penggunaan daya nalar dan fikir, yang dalam banyak hal, terutama dalam konteks kepemimpinan, wanita tidak dapat melakukan hal yang sama dengan pria. Lebih jauh Hamid Muhammad Abu Thalib mengemukakan bahwa kehadiran wanita dalam sebuah kepemimpinan dapat menimbulkan fitnah, terutama bertentangan dengan kelaziman yang berlaku dalam masyarakat.

Argumentasi lain yang dikemukakan oleh kelompok ini adalah hadis Rasul yang meriwayatkan tentang kematian raja Kisra, Nabi sempat mengemukakan pertanyaan di kalangan sahabat siapakah yang layak akan menggantikan raja Kisra. Para sahabat serta merta menjawab putrinya sebagai pengganti raja. Kemudian Nabi segera membantah atau mengkritik jawaban sahabat itu dengan mengemukakan bahwa tidak akan mengalami kesuksesan suatu bangsa apabila pemimpin diserahkan kepada wanita.

Sebagian ulama menafsirkan hadits tersebut yang melarang pemimpin wanita juga menggunakan logika silogisme, hampir identik dengan *qiyas*. Logika silogisme

yang digunakan para ulama dalam memahami hadits tersebut adalah bahwa, hadits tersebut bersifat celaan, sedangkan celaan membawa larangan, dan selanjutnya larangan itu berarti juga menunjukkan jeleknya sesuatu yang dilarangnya. Dari pernyataan ini jelas apapun alasannya wanita sebagai pemimpin tetap tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Tidak saja menggunakan nash-nash syari'at sebagai argumentasi larangan wanita sebagai pemimpin, akan tetapi mereka juga mengemukakan faktor historis yang berkembang dalam peradaban umat Islam. Menurut mereka, memang tidak pernah tercatat dalam sejarah, Rasulullah maupun para sahabat sesudahnya, *khulafa al-Rasyidin*, mengangkat wanita sebagai pemimpin, Jika saja secara syari'at dibolehkan, tentu ada wanita yang diangkat menjadi pemimpin untuk memerintah suatu wilayah atau daerah. Terlepas dari akurat atau tidaknya argumentasi yang digunakan kelompok ulama pertama ini, yang jelas bahwa kaum wanita tidak boleh diangkat sebagai pemimpin.

Pendapat ini lahir karena lingkungan sosial tokoh-tokoh mazhab ini. Seperti diketahui tokoh tokoh madzhab seperti Maliki dan Syafi'i, berpendapat bahwa wanita tidak sah menjadi seorang pemimpin, hal ini dapat dimengerti karena wanita-wanita di Hijaz, di mana Malik dan juga Syafi'i pernah tinggal, masih sangat terikat dengan struktur sosial ke-Arab-an yang cenderung eksklusive, terbiasa dengan tradisi pingitan. Kebebasan mereka dalam melakukan aktifitas di luar rumah sangat dibatasi. Kondisi Hijaz dan Madinah yang cenderung bersahaja, sederhana dan jauh dari pengaruh kebudayaan luar dan problematikanya, semakin memperkuat tradisi lokal bagi para penduduknya, termasuk tentang status wanita. Kondisi ini jelas berpengaruh besar terhadap cara berfikir masyarakat Arab waktu itu, dan pada gilirannya memiliki pandangan yang agak "bersahaja" terhadap wanita. Faktor ini agaknya yang membuat para ulama membatasi peran kaum wanita dalam kapasitasnya sebagai pemimpin.

Faktor lain yang dapat diduga mengapa Imam Malik melarang wanita sebagai pemimpin, adalah sikapnya yang komitmen kepada hadits Rasul di mana secara eksplisit sebagaimana diungkapkan di atas, ada indikasi hadits rasul yang melarang keterlibatan wanita dalam proses kepemimpinan. Teguh pendiriannya pada Hadits yang sedemikian rupa ini pula agaknya Imam Malik tidak mau mengambil resiko dengan membolehkan wanita sebagai pemimpin. Pendapat yang sama juga disampaikan Imam Syafi'i, walaupun ia tidak lama tinggal di Madinah, bisa jadi, pemikiran Malik yang sempat menjadi gurunya dalam bidang hadits mempengaruhi Syafi'i. Tidak heran jika iapun melarang wanita untuk menjadi pemimpin.

Kelompok kedua menyatakan bahwa wanita mempunyai hak penuh dalam politik dan kepemimpinan sebagaimana laki-laki. Namun mereka membatasi kepemimpinan itu. Semua kepemimpinan dapat dipegang wanita kecuali kepemimpinan tertinggi

seperti kepala negara atau *khalifah*. Kelompok ini berpegang kepada ayat al-Quran yang menjelaskan 'adalah dan *musawah* dalam Islam yang merupakan prinsip ajaran Islam. Ayat itu lengkapnya berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧﴾

Menurut mereka ayat menjelaskan bahwa antara laki-laki dan wanita memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berpolitik. Sebagaimana laki-laki-laki, wanita juga memiliki hak mengatur masyarakat umum atau *wilataul'am*. Mereka memiliki hak yang sama untuk memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Wanita juga boleh menjadi seorang pemimpin seperti *mu'awwin* atau para menteri.⁸

Kelompok kedua ini juga berargumentasi dengan firman Allah dalam al-Quran yang berbunyi:

• وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٩﴾

Mereka juga mengemukakan riwayat yang sangat terkenal mengenai sahabat Umar bin Khatthab dan seorang wanita yang menyanggahnya. Suatu ketika Umar berkhotbah di masjid menghimbau agar jangan memberikan mahar yang tinggi kepada wanita. Sekonyong-konyong mendapat kritikan dari seorang wanita yang menyatakan bahwa ia pernah mendengar firman Allah yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَ مَكَانِ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَانُكُمْ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونَ بِهِتْنَا وَإِنَّمَا مَيْبِنَا ﴿١٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ
وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١٠﴾

Setelah ayat tersebut dibacakan, Umar mengatakan bahwa pernyataan wanita tadi yang benar dan pendapatnya yang salah.

Riwayat ini, menurut mereka, adalah bentuk persetujuan dan sikap akomodatif Umar terhadap peranan wanita dalam wilayah publik, artinya seorang wanita

dibenarkan oleh Islam untuk turut serta dalam mengurus umat dan terlibat dalam politik praktis.

Kelompok kedua ini diimami Abu Hanifah, yang mengemukakan argumentasi bahwa sah-sah saja jika wanita menjadi pemimpin sepanjang kepemimpinan yang dihadapinya diperkirakan dapat dikuasainya. Pendapat ini agaknya dianalogikan dengan bahwa ada wanita-wanita tertentu memiliki kemampuan, kecerdasan dan kapabilitas yang sama atau melebihi laki-laki.

Kelompok ulama ketiga membolehkan wanita sebagai pemimpin secara muthlak. Kelompok ini diwakili oleh Ibnu Jarir Ath-Thabary, dan Ibu Hazm, berargumentasi pada beberapa poin, yaitu:

1. Tidak satupun ayat dalam al-Qur'an maupun pernyataan Rasul (Hadits) yang secara tegas melarang wanita sebagai pemimpin.
2. Berbeda dengan kelompok pertama yang tidak menemukan data sejarah tentang pemimpin wanita, menurut Ibnu Jarir justru secara historis pernah terjadi pengangkatan seorang wanita sebagai pemimpin, pada masa Umar Ibnu Khattab, yang mengangkat wanita menjadi pemimpin dari suku al-Syuq, bernama Al-Syifa
3. Menggunakan analogi terhadap keabsahan fatwa seorang wanita yang dianggap sah, dengan kata lain jika fatwa wanita dianggap sah, maka tentu saja kepemimpinannya pun dapat dianggap sah.

Kelompok ketiga ini mengungkapkan sebuah hadis yang menyatakan kedudukan wanita yang setara dengan laki-laki, yang berbunyi:

النساء شقائق الرجال¹¹

Hadis menggambarkan bahwa sebagai saudara kandung laki-laki, maka wanita dapat pula menduduki apa yang dapat diduduki oleh saudara kandungnya, termasuk kedudukan sebagai pemimpin.

Kepemimpinan Wanita Dalam Sejarah Indonesia dan Riau

Dalam perjalanan sejarah di beberapa wilayah di Indonesia, kita mengenal beberapa tokoh wanita yang menduduki posisi tinggi. Dalam sejarah Aceh misalnya, ada empat orang yang pernah menjadi *Sultanah*.¹² Menurut tradisi Kerajaan Aceh, yang berhak menjadi raja atau sultan adalah anak laki-laki tertua dari permaisuri, bila tidak ada maka bolehlah kaum wanita. Jadi, tetap saja wanita menempati prioritas setelah kaum laki-laki.

Ketika Sultan Iskandar Thani meninggal dunia pada tahun 1641, dengan tidak meninggalkan anak, maka isterinya diangkat sebagai Sultan Aceh dengan gelar Sultanah Syafiatuddin Syah. Penobatan ini bukannya tanpa perdebatan lebih dahulu

di kalangan ulama. Barulah setelah Tengku Abdurrauf dari Singkel,¹³ seorang ulama terkemuka di Kerajaan Aceh waktu itu, mengemukakan pendapatnya bahwa urusan agama harus dipisahkan dari urusan pemerintahan, maka penobatan pun bisa dilangsungkan dengan selamat. Sultanah Syafiatuddin Syah berhasil bertahan memerintah hingga wafatnya pada tahun 1675. Ia kemudian digantikan berturut-turut oleh tiga orang raja wanita yaitu Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah (1675-1678), Ratu Inayat Zakiatuddin Syah (1677-1688), dan Ratu Kamalat Zainatuddin Syah (1688-1699). Secara ringkas, riwayat empat sultanah di negeri Aceh adalah sebagai berikut:

Pertama, Sultanah Safiatuddin Tajul Alam. Nama aslinya Safiatuddin. Ia masih merupakan garis keturunan Sri Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam. Anak tertua Sultan Iskandar Muda ini lahir pada tahun 1612 M dengan nama Putri Sri Salam. Kemudian ia mendapat gelar *Sultanah Ratu Safiatuddin Tajul-'Alam Syah Johan Berdaulat Zillu'llahi fi'l-'Alam binti al-Marhum Sri Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam. Safiatud-din Tajul-'Alam* memiliki makna "kemurnian iman, mahkota dunia." Ia memerintah antara tahun 1641-1675. Sultanah satu ini gemar mengarang cerita dan sempat membantu berdirinya perpustakaan di negerinya. Safiatuddin meninggal pada 23 Oktober 1675.¹⁴

Sebelum Safiatuddin menjadi sultan (sultanah), Aceh dipimpin oleh suaminya, yakni Sultan Iskandar Tsani (1637-1641). Setelah Iskandar Tsani mangkat, Aceh masa itu kesulitan mencari pengganti sultan laki-laki yang masih ada hubungan saudara/keluarga dekat. Aceh sempat mengalami kericuhan masa itu, sebab kaum ulama dan wujudiah tidak menyetujui adanya pemimpin wanita dengan alasan tertentu. Kemudian, seorang ulama besar, Nuruddin Ar-Raniry menengahi masalah tersebut dengan menolak argumen-argumen ulama lainnya sehingga diangkatlah Safiatuddin menjadi sultan Aceh.

Kedua, Sultanah Naqiatuddin Nurul Alam. Sultanah Naqiatuddin Nurul Alam adalah putri Malik Radiat Syah, yang memerintah setelah mangkatnya Sultanah Safiatuddin. Kepemerintahan Naqiatuddin hanya tiga tahun (1675-1678). Namun demikian, ada hal yang sangat fundamental dilakukannya, yakni keberanian mengubah Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh dan Adat Meukuta Alam. Aceh akhirnya dibentuk menjadi tiga federasi yang kemudian lebih akrab dengan sapaan *Aceh Lbee Sagoe*. Setiap pemimpin *sagi* disebut *Panglima Sagoe* (Panglima Sagi). Maksud pemerintahan seperti agar birokrasi tersentralisasi dengan menyerahkan segala urusan kedaerahan kepada pemimpin *tiga sagi* tersebut. Sistem ini pula kemudian diadopsi oleh negara luar, termasuk penjajah Belanda.¹⁵

Ketiga, Sultanah Zaqiatuddin Inayat Syah. Sultanah ketiga ini mengganti sultanah sebelumnya, Sultanah Naqiatuddin. Wanita yang satu ini digambarkan sebagai seorang

yang bertubuh tegap dan bersuara lantang. Awak Inggris kala itu mengunjungi Zaqiatuddin saat berusia 40 tahun untuk membangun sebuah benteng pertahanan guna melindungi kepentingan perdagangan. Namun, sultanah bijak ini menolak. "Inggris boleh datang ke Aceh, tapi tidak ada izin untuk membangun benteng sendiri," ucapnya tegas. Zaqiatuddin mangkat pada 3 Oktober 1968. Tampuk kepemimpinan kemudian dipegang oleh Sultanah Zainatuddin Kamalat Syah.¹⁶

Keempat, Zainatuddin Kamalat Syah. Seperti disebutkan di atas, Sultanah Zainatuddin Kamalat Syah binti al-Marhum Raja Umar¹⁷ mewarisi tahta kerajaan dari Zaqiatuddin. Tampuk kepemimpinan dipegangnya pada tahun 1688. Ada dua versi tentang asal-usulnya. *Pertama*, ia adalah putri dari Raja Umar bin Sutan Muda Muhammad Muhidudin sekaligus adik angkat dari Sultanah Zaqiatuddin Inayat Syah. *Kedua*, ia disebut anak angkat Sultanah Safiatuddin Syah. Yang jelas, Ratu Zaqiatuddin Syah berasal dari keluarga-keluarga Sultan Aceh juga. Pada masa pemerintahannya, ia mendapatkan kunjungan dari Persatuan Dagang Perancis dan serikat dagang Inggris, East Indian Company. Zainatuddin menikah dengan Sayid Ibrahim yang kemudian menggantikannya menjadi sultan Aceh dengan gelar Sultan Badrul Alam.¹⁸

Selain para sultanah, tidak boleh dilupakan wanita-wanita Aceh yang menjadi pemimpin yang gagah berani seperti Keumalahayati, seorang Laksamana Kerajaan Aceh atau admiral. Ia adalah pemimpin armada laut pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayatsyah (1589-1604). Wanita Aceh terkemuka lainnya, Cut Nyak Dhien, menduduki peran penting yaitu memimpin perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda, setelah suaminya, Teuku Umar, gugur ditembak Belanda.¹⁹ Pemimpin lainnya adalah Cut Nyak Meutia, yang lahir pada tahun 1870, dan gugur ditembak Belanda pada tahun 1910 setelah memimpin perjuangan bersenjata yang sangat keras.

Ringkasnya, daftar wanita yang menjadi pemimpin di negeri Aceh adalah seperti Putri Lindung Bulan sebagai Perdana Menteri, Nihrasiyah Rawangsa sebagai Ratu, Khadiyu sebagai Laksamana, Malahayati sebagai Laksamana, Meurah Ganti sebagai Laksamana Muda, Cut Meurah Inseuen sebagai Ratu, Cut Nyak Keureuto sebagai otonom (*Uleebalang*), Cut Nyak Fatimah sebagai Kepala daerah otonom (*uleebalang*), Sultanah Nurul Alam sebagai kepala otonom (*Uleebalang*), Sultanah Kamalat Syah sebagai *uleebalang* penasihat, Pocut Meuligo sebagai *uleebalang*, penasihat perang dan jenderal di Samalanga, Tengku Fakinah sebagai Jenderal dan Ulama, memiliki *dayah*, Cut Nyak Dien sebagai Jenderal di Aceh Barat, Cut Meutia sebagai Jenderal di Aceh Utara, dan Pocut Baren Biheue sebagai Jenderal di Aceh Barat.²⁰

Kepemimpinan wanita dapat pula ditemukan dalam sejarah Jawa, disebutkan tentang adanya Ratu Sima, seorang Raja dari Kerajaan Kalingga abad ke-7 yang dikenal sebagai raja yang adil bijaksana. Kemudian seorang ratu yang terkenal dari Majapahit yaitu Sri Gitarja bergelar Tribhuwana Wijayatunggadewi (1328-1350),

ibunda Raja Hayam Wuruk dan Ratu Suhita yang memerintah antara 1429-1447. Orang juga tidak pernah melupakan seorang Ratu dari Jepara, yang telah disebut di atas yaitu Ratu Kalinyamat, yang bukan saja menduduki jabatan politik tertinggi di Jepara pada abad ke-16, tetapi ia juga adalah seorang ratu yang berani menggempur Portugis di Malaka. Bahkan, ia juga mempersiapkan kapal-kapal penggempur yang dibuat di galangan kapal miliknya yang sangat besar.

Dalam perjalanan sejarah Kesultanan Banten, pernah juga seorang wanita menduduki jabatan sebagai Mangkubumi Banten yaitu Ratu Syarifah Fatimah, terlepas dari citranya yang kurang baik. Ia menduduki jabatan ini pada tahun 1748, dengan terlebih dahulu menyingkirkan para pewaris yang sah atas bantuan VOC.

Di Sumedang, pada abad ke-18 pernah ada seorang wanita yang menjadi bupati dan dikenal sebagai Dalem Isteri Raja Ningrat (1744-1759). Puteri sulung Pangeran Kusumahdinata ini diangkat menjadi bupati karena ketika ayahandanya meninggal, ketiga adik laki-lakinya belum dewasa, cucu sulungnya yang laki-laki juga masih kecil. Lima belas tahun bukan waktu yang sebentar untuk memerintah sebuah kabupaten yang wilayahnya cukup luas. Sebenarnya juga, leluhur Bupati Isteri ini ada yang pernah menjadi ratu di Kerajaan Sumedanglarang, bawahan Kerajaan Sunda, yaitu Nyi Mas Ratu Patuakan yang kemudian digantikan oleh puterinya yaitu Nyi Mas Ratu Inten Dewata atau Ratu Pucuk Umun. Jadi, setidaknya di Sumedang pernah ada dua orang Ratu, Raja Puteri, dan seorang bupati wanita. Ini menunjukkan bahwa ada wanita Indonesia yang memiliki kedudukan sejajar dengan pria, meski tentu ini hanya bersifat kasuistis.

Kepemimpinan di negeri Melayu, secara apik dan menarik diungkapkan oleh Rida K Liamsi²¹ tentang kedigjayaan politik wanita di negeri Melayu. Menurutnya, panggung sejarah Kemaharajan Melayu yang jatuh-bangun selama hampir 500 tahun, sejak pertengahan abad ke-15 sampai awal abad ke-20, mulai dari era Malaka sampai ke era Lingga, tercatat sejumlah nama wanita yang perkasa, berhati baja, dan telah berjuang dengan segala daya mereka, baik dalam membela negeri, kekuasaan, maupun martabat bangsa dan kaumnya. Ada yang berjuang dengan menghunus senjata, berperang dari satu laut ke laut lain, ada yang menggunakan segenap kekuatan pesona dan ketegarannya untuk melawan kezaliman para penguasa, ada yang berjuang dengan segenap daya menegakkan marwah, harkat dan martabat negeri dan bangsanya.²²

Rida K Liamsi menyebutkan beberapa nama *pertama* Tun Fatimah, permaisuri Sultan Mahmud I Malaka, puteri Tun Mutahir, sang Bendahara. Dia bertempur bersama Sultan Mahmud menghadapi serangan Portugis (1511), mulai dari Malaka, terus ke Bintan, dan akhirnya mundur ke Kampar, di mana Sultan Mahmud mangkat dan Malaka takluk. Meskipun Tun Fatimah tidak mencintai suaminya, sang Sultan, tapi dia menyabung nyawa, demi negeri bernama Malaka.

Tun Fatimah mempunyai watak utama Tun Fatimah dengan riwayatnya yang tragik dan menakjubkan itu. Berdasarkan atas fitnah, Sultan Mahmud Syah menyuruh membunuh semua keluarganya, kecuali seorang anak laki-laki yang masih muda, Tun Hamzah dan dia kemudian mengambil Tun Fatimah sebagai isteri.²³

Tun Fatimah adalah lambang perjuangan wanita dalam politik yang biasanya adalah perjuangan lelaki. Wanita juga berhak untuk berkhidmat kepada bangsa, agama, raja dan tanah air. Menurutnya, sudah sampai masanya dalam zaman ini wanita ikut sama bertarung nyawa bersama-sama mempertahankan tanah airnya. Wanita bukan hanya jadi bunga perhiasan bangsa dan negeri, bahkan pembantu lelaki dalam serba perjuangan. Lebih baik kita mati daripada hidup di bawah perintah orang lain.

Kedua, Ratu Emas, isteri Raja Haji Fisabilillah. Puteri Sultan Jambi ini berjuang melawan kompeni Belanda dalam Perang Riau (1782-1784). Bersama suaminya Yang Dipertuan Muda IV Raja Haji Fisabilillah, mereka menyerang kompeni di Malaka. Saat Raja Haji tewas dan jenazahnya dilarikan Belanda dan dikuburkan secara diam-diam di kaki benteng Malaka, Ratu Mas berjuang untuk merebutnya kembali dengan darah dan airmata, meskipun dia gagal.

Ketiga, Tun Teja, wanita jelita tetapi berhati baja. Dia melawan kezaliman Sultan Malaka, suaminya, untuk mempertahankan hak dan harkat wanita sebagai permaisuri, sebagai ratu penjaga negeri. Dia berjuang menyelamatkan negeri Pahang, tempat dia dibesarkan dari rampasan Sultan Malaka.

Keempat, Puteri Retno Dumilah, puteri Raja Majapahit, yang mengembara ke negeri Malaka, karena cintanya kepada Laksamana Hang Tuah, namun dia dipaksa oleh Sultan Malaka untuk dijadikan permaisurinya. Dia lebih rela menjadi Pen Asmara dan menghuni Gunung Ledang di darat Malaka, ketimbang mengkhianati cinta dan hati nuraninya.

Kelima, Engku Puteri Hamidah, permaisuri Sultan Mahmud III, Sultan Riau-Lingga (1762-1812), yang melawan semua tekanan kekuasaan, baik kerajaan Lingga, maupun tekanan Inggris dan Belanda, untuk mempertahankan hak dan marwah kerajaan, kekuatan adat dan budaya Melayu, meski yang ada padanya hanya keyakinan, ketegapan hati, dan semangat baja. Dia berjuang dengan kekuatan hujjah, hukum, norma, adat dan kata-kata bijak lainnya, melawan senapan, kelewang, suap dan meriam kekuasaan. Masih banyak nama lain, seperti Tengku Embung Fatimah, Tengku Tengah, dll., sosok yang begitu tegar, teguh, dan juga ambisius.²⁴

Namun dari lima wanita yang disebut oleh Rida, penulis hanya akan mencoba mengeksplorasi Engku Puteri Hamidah. Hal ini karena dalam sejarah melayu ia lebih kelihatan kepemimpinan dari empat wanita lainnya, di samping keterbatasan data yang penulis dapatkan. Di samping itu, peneliti akan menggambarkan pula seorang Sultanah yang dikenal oleh masyarakat Riau, yaitu Tengku Agung Sultanah Latifah. Penulis juga akan uraikan sedikit tentang seorang wanita yang menjadi walikota di Tanjung pinang, Suryatati A Manan.

a. Engku Puteri Raja Hamidah

Engku Puteri Raja Hamidah adalah wanita Riau yang sangat istimewa dalam sejarah Melayu.²⁵ Ia bukan sekedar wanita di balik kekuasaan Sultan Mahmud Marhum Besar, melainkan juga pemilik Pulau Penyengat Indera Sakti yang menjadi pusat pemerintahan dari Kerajaan Riau-Lingga dan daerah taklukannya (Riau-Lingga-Johor-Pahang). Bahkan, Engku Puteri juga memegang kendali pemerintahan sekaligus pemegang *regalia* atau alat-alat kebesaran kerajaan Riau-Lingga.²⁶

Raja Hamidah lahir sekitar tahun 1774, Raja Hamidah dilahirkan di Ulu Riau, pusat pemerintahan kerajaan Riau Lingga, setelah pusat kerajaan pindah dari Johor. Ketika dia dilahirkan, ayahnya, Raja Haji masih bestatus Kelana Putera Jaya, yaitu jabatan yang diberikan kepada calon Yang Dipertuan Muda. Tugasnya menjaga teluk rantau, dan memerangi musuh yang datang. Raja Hamidah mungkin dilahirkan di istana Kota Piring, karena ayahnya sudah membangun istana megah itu, jauh sebelum dia menjadi Yang Dipertuan Muda. Mungkin juga di kawasan istana Yang Dipertuan Besar di Ulu Riau, karena di kawasan itu dahulunya baik Yang Dipertuan Besar (sultan), maupun Yang Dipertuan Muda, menetap bersama. Catatan yang ada menunjukkan hanya adiknya, Raja Ahmad, yang dipastikan lahir di Istana Kota Piring itu, 1778. Raja Hamidah masih mempunyai beberapa saudara yang lain. Yang seibu dan seayah, adalah Raja Siti. Seayah berlainan ibu, antara lain Raja Djafaar, Raja Idris, dan tentu saja Raja Ahmad, si bungsu.²⁷

Engku Puteri merupakan wanita paling disegani dan sangat dihormati pada masa akhir kerajaan Riau-Lingga dan daerah taklukannya. Hancurnya kerajaan Riau-Lingga secara kronologis berawal dari wafatnya Sultan Mahmud pada 12 Januari 1812 M, dan dinobatkannya salah satu putera Sultan Mahmud oleh Raja Jaafar (saudara seayah Engku Puteri) tanpa meminta persetujuan Engku Puteri sebagai pemegang *regalia*²⁸ kerajaan. Tanpa persetujuannya, *regalia* kerajaan tidak akan diserahkan kepada raja baru. Selain itu, ditangannyalah sebenarnya tonggak kerajaan dipertaruhkan. Perseteruan dua anak tirinya dalam memperebutkan jabatan kekuasaan sepeninggal suaminya dan sikap kerasnya dalam mempertahankan *regalia* turut memperkeruh suasana.²⁹

Pada umumnya, *regalia* di kerajaan-kerajaan Nusantara berupa payung, tepak sirih, peralatan dari emas, perak, persenjataan dan sebagainya. Semua benda-benda itu sangat penting terutama digunakan pada saat upacara pelantikan seorang raja. Penabalan atau penobatan seorang raja dianggap tidak memenuhi syarat apabila tidak disertai oleh kebesaran itu. Tak heran, karena nilai legitimasi yang terkandung di dalamnya, benda-benda tersebut sering diperebutkan.

Sumber teks Belanda menyebutkan bahwa Engku Puteri enggan menyerahkan *regalia* kerajaan kepada Sultan Abdurrahman (putra tiri bungsu) karena ia lebih

memihak Sultan Husin (putra tiri sulung). Namun, sejarah berkata lain. Perseteruan dua saudara kandung ini menjadikan Sultan Abdurrahman meminta bantuan pemerintah Hindia-Belanda dengan mengatasnamakan Gubernur Jenderal agar *regalia* kerajaan itu diserahkan kepadanya. Sebaliknya, Sultan Husin yang ternyata juga berambisi menjadi raja meminta bantuan pihak Inggris untuk memperebutkan *regalia* itu. Konon kabarnya, ia bahkan berusaha mengkompensasikan *regalia* kerajaan itu dengan uang sebesar 50.000 ringgit Spanyol.

Engku Puteri menghadapi buah simalakama. Kedua anak tirinya saling berseteru memperebutkan tahta dengan menggadaikan marwah kerajaan. Sultan Husin yang menjadi kaki tangan pihak Inggris berusaha menerapkan *money politic*, sedangkan Sultan Abdurrahman menerapkan paksaan dengan menempatkan pasukan Belanda untuk mengepung istana Engku Puteri.

Menurut pakar adat Melayu, peristiwa *money politic* maupun pengambilan paksa *regalia* kerajaan merupakan penghinaan besar terhadap marwah kerajaan. *Regalia* kerajaan yang terbuat dari emas tersebut memuat nilai-nilai kebesaran. Jika hendak dibeli atau diambil paksa, maka lenyaplah nilai-nilai kebesaran itu. Dalam buku ini diungkapkan bahwa *regalia* yang terbuat dari emas itupun hanya akan tinggal logamnya saja, tidak lagi mengemban semangat kebesaran bangsa Melayu.

Sumber-sumber terpercaya dalam buku ini mengungkapkan bahwa *regalia* kerajaan menjadi penentu sah tidaknya penobatan seorang sultan. Penyerahan *regalia* kerajaan tanpa “berkat” dari sang pemegangnya menjadi tidak bermakna apa-apa. Pada tanggal 13 Oktober 1822, *regalia* kerajaan itu memang sudah berpindah tangan, namun tanpa restu dari sang empunya, Engku Puteri.

Singkat cerita, penobatan Sultan Abdurrahman menjadi raja di Kerajaan Riau-Lingga tidak disaksikan oleh Engku Puteri, namun justru disaksikan oleh wakil pihak Belanda. Bahkan alunan gendang *nobat* dalam adat istiadat Melayu yang semestinya dialunkan dengan penuh khidmat dan takzim juga tercemari oleh kolaborasi lagu-lagu Eropa yang dimainkan oleh korp musik militer Belanda. Baru kali itu kesakralan penobatan raja menjadi sebuah upacara yang “tidak biasa”. Ketidakhadiran Engku Puteri dan tiadanya restu terhadap penyerahan *regalia* kerajaan menjadi pertanda buruk peristiwa yang kelak terjadi. Setahun kemudian, kerajaan Riau-Lingga benar-benar mengalami kehancuran.

Menurut Rida K. Liamsi Engku Puteri telah menjadi *think tank* Sultan Mahmud. Menjadi penasihat (bukan pembisik), dan pengawal adat istiadat dan budaya kerajaan Melayu. Karena itu pulalah agaknya, kemudian Sultan Mahmud, memberi dia tugas menjadi penjaga dan pemegang Regalia Kerajaan (sebuah perangkat sakral kerajaan, tanda dan panji kebesaran, perangkat nobat, sirih besar, gendang, nafiri, *ull*). Bagi Kerajaan-kerajaan Melayu, sebuah kerajaan boleh saja

ditaklukan, direbut, dan dikuasai oleh pihak lain. Raja atau Sultannya bisa saja terusir dan melarikan diri ke kawasan lain, mencari pertindungan. Tetapi, selagi Regalia Kerajaan tidak dirampas, tidak direbut, selagi Regalia sakti dan keramat itu masih dipegang sang Rajanya, maka selagi itulah kedaulatan negeri itu masih tegak. Sultannya tetap punya daulat, dan dia bisa berkerajaan dimana saja, dan dirajakan dimana saja. Karena sukma yang sakti itu, belum ditaklukkan. Karena itulah, siapapun yang memegang dan diberi tugas menjaga Regalia itu, adalah seorang yang kuat dan perkasa. Seorang yang kuasanya jauh diatas kekuasaan lain, termasuk sultannya sendiri.

Perlawanan yang dilakukan Engku Puteri dalam mempertahankan Regalia Kerajaan Riau Lingga itu, adalah perlawanan terhadap penjajahan dan penindasan yang ingin merampas kedaulatan Riau Lingga melalui perampadan terhadap simbol kedaulatan kerajaan Riau Lingga. Perlawanan menentang sikap zalim dan kejam para penjajah dalam menindas dan merendahkan harkat dan martabat suatu negeri, sebuah bangsa tang bernama Melayu. Sebuah rumpun bangsa, sebuah negeri, sebuah tradisi yang ratusan tahun sudah tegak dan berperan membangun rantau di nusantara ini.

Engku Puteri tidak menembakkan meriam, tidak mengangkat kelewang, tidak seperti ayahandanya Raja Haji Fisabilillah. Tapi dia melawan dengan keteguhan hati, kekuatan jiwa. Dia melakukan pemberontakan secara kultural terhadap kekuasaan asing yang ingin menghancurkan kebudayaan sebuah negeri. Perlawanan budaya ini juga pernah dilakukan tahun 1902 dan 1903, ketika Sultan Abdurrahman Muazzamsyah (1885-1911) memerintahkan agar bendera Belanda tidak dipasang di Kapal kebesarannya, dan tanggal 1 Januari 1903, dia memerintahkan pembesarnya agar memasang bendera Kerajaan Riau Lingga diatas bendera Belanda di pulau Pnyengat Peristiwa ini telah menimbulkan kemarahan Residen Belanda, dan menuduh Sultan Abdurrahman Muazamsyah telah membangkang dan memberontak. Sebuah pemberontakan kultural, yang jauh lebih tajam dan keras dampaknya dari pada perlawanan bersenjata.³⁰

b. Kerajaan Tengku Agung Syarifah Latifah

Tengku Agung Sultanah Latifah itu adalah sultanah atau permaisuri Sultan Siak terakhir, Sultan Syarif Qasim II yang memimpin Siak Indrapura pada 1908 – 1946.³¹ Bagi rakyat Siak, terutama kaum wanitanya, Sultan Agung menjadi suluh di tengah kegelapan. Betapa tidak pada tahun-tahun awal memasuki abad ke 20 itu, Melayu di Siak masih tertinggal. Sangat sedikit yang merasakan pendidikan. Bahkan kemampuan keterampilan masih sangat terbatas. Tengku Agung tergerak hatinya. Apalagi sekitar tahun 1920an di tanah Jawa, gerakan

pemuda yang di ikuti kaum wanita bergelora, sehingga kaum wanita haruslah pandai. Oleh karena itu kaum wanita harus sekolah.

Atas dasar itu Sultanah Latifah mendirikan sekolah yang dinamakan Sultanah Latifah School 1926. Pada saat itu Belanda juga mendirikan sekolah Volk Schoel dan HIS. Di sekolah Sultanah Latifah School diajarkan baca tulis, agama, dan belajar bahasa Belanda juga belajar keterampilan masak-masak. Di sini gurunya juga kaum wanita. Tengku Agung juga mendatangkan guru-guru dari daerah-daerah maju.

Kerajaan Siak pada masa itu di bawah kekuasaan Belanda yang berpusat di seberang sungai, tepatnya di Benteng Hilir. Walaupun takluk pada Belanda melalui "traktak Siak" pada masa pemerintahan Sultan Assyaidis Syarif Ismail Abdul Jalil Jalaluddin (1827-1864), namun Belanda tidak diperkenankan menguasai kawasan Istana Siak. Karena itulah pusat pemerintahan Belanda berada di seberang sungai.

Sultan atas desakan Tengku Agung hendak memberlakukan wajib belajar di Siak. Oleh karena itu, ia tidak mentolerir anak sekolah yang suka mangkir dan memilih menakik getah supaya mendapat uang dari perusahaan getah. Sultan dan Tengku Agung gemar mengunjungi sekolah-sekolah seraya bertanya jawab dengan murid-murid dan majelis guru, serta mengizinkan istananya dikunjungi oleh murid-murid. Sultan juga menyediakan sampan untuk penyeberangan terutama bagi murid-murid yang tinggal di seberang Sungai Siak. Asrama disediakan bagi murid sekolah yang berasal dari luar atau tidak tinggal di rumah famili di Siak Sri Indrapura. Beasiswa diberikan kepada mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di luar Siak.³²

Sejarah Latifah School di Kerajaan Siak terkait erat dengan riwayat hidup Tengku Agung (1896-1929) permaisuri Sultan Syarif Kasim II. Dari peninggalan berupa foto-foto, Tengku Agung digambar sebagai perempuan cantik dan anggun. Dari tutur lisan masyarakat Siak, ia dikisahkan berbudi pekertinya halus dan memiliki tutur kata yang lembut. Susur galurnya dari garis ayahnya, Tengku Agung berasal dari Siak dan dari sebelah ibu, Tengku Agung adalah kemenakan dari Sultan Langkat.

Kota Tanjungpura di Kerajaan Langkat sebagai kota kelahiran Tengku Agung, merupakan kota dengan pendidikan yang terus tumbuh dan berkembang dengan baik. Tengku Agung sering mendampingi sultan dalam kunjungan ke luar istana. Di antaranya, tatkala sultan pergi ke Medan menghadap residen Belanda, Tengku Agung turut serta. Medan adalah kota yang maju di Sumatera. Di sana, Tengku Agung mendapati bahwa perempuan telah memperoleh pendidikan. Bahkan mereka memiliki rumah sakit bernama *Inlandsche Vrouwen Hospitaal* dan perkumpulan seperti Keutamaan Istri.³³

Dapat dikatakan, kemajuan pendidikan perempuan di kota Tanjungpura, tempat kelahiran Tengku Agung dan di Medan, kota yang dikunjunginya, telah menginspirasi Tengku Agung untuk mendirikan sekolah bagi perempuan Siak pada tahun 1927. Latifah School termasuk dalam group sekolah *landschap*, mendapat simpati dari kerajaan, dan sepenuhnya dibiayai oleh sultan. Umumnya buku-buku sejarah tentang Siak saat ini dan informan yang ditemui sepakat bahwa Latifah School didirikan atas ide prakarsa Tengku Agung yang mendapat dukungan penuh dari sultan. Mereka berpegang pada pemberian nama Sultanah Latifah School tersebut terkait dengan peran Tengku Agung atas sekolah tersebut. Ada dikatakan tetapi belum dapat dibuktikan bahwa sekolah ini disebut sekolah sultanah, karena status Tengku Agung adalah sultanah yang dapat menggantikan sultan jika sultan berhalangan.

Latifah School merupakan sekolah khusus perempuan pertama di Riau dan kurikulum serta pengelolannya berada dalam pengawasan Tengku Agung. Selain pengetahuan umum dan bahasa Belanda, di sekolah ini juga diajarkan keterampilan kerumahtanggaan (*huishouden*), keterampilan tangan (*handwerken*), dan kebersihan (*hygiene*). Pada tahun 1929, Leyds melaporkan Latifah School memiliki dua kelas, 50 murid, absen sekitar 2%, dan satu orang guru perempuan. Dua tahun kemudian, Valk melaporkan bahwa jumlah muridnya 66 orang dengan tiga orang guru. Tidak disebutkan siapa guru-guru tersebut, namun disebutkan bahwa mereka sengaja didatangkan dari luar Siak, sesuai dengan kebutuhan matapelajaran. Halimah Batang Taris dari Pematangsiantar mengajar Bahasa Belanda merangkap kepala sekolah, Encik Saejah dari Siak Sri Indrapura mengajar pelajaran menjahit, dan Zaidar dari Payakumbuh mengajar memasak. Disebutkan bahwa Latifah School dapat berkembang sampai lima kelas. Boleh dikatakan bahwa jumlah murid Latifah School cukup besar dan terdapat peningkatan jumlah murid dan guru pada lima tahun pertama keberadaannya.³⁴

Kesimpulan

Kedudukan wanita dalam Islam dalam perkembangan Islam sebenarnya sudah mengalami pencerahan yang cukup signifikan. Polemik para ulama dalam kapasitas wanita sebagai pemimpin juga berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, dan struktur masyarakat tertentu yang diduga kuat mempunyai andil cukup besar terhadap pemikiran ulama dalam memandang kedudukan wanita sebagai pemimpin. Disamping itu persoalan-persoalan yang berat yang dihadapi masih dianggap sesuatu yang riskan jika harus diserahkan pada wanita. Itulah sebabnya para ulama fiqh telah melakukan usaha maksimal untuk membuat kualifikasi formal bagi seorang pemimpin.

Endnotes

¹ Allah Ta'ala berfirman, yang berbunyi:

وَأَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang wanita dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya." (QS. Al Baqarah: 282)

² Firman Allah yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak wanita" Lihat Al-Quran surat An-Nisa' ayat 11.

³ Ada hadis yang secara tegas menyebutkan bahwa kepemimpinan wanita akan membawa kerugian sebagaimana ungkapan berikut:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ لَقَدْ نَعَى اللَّهُ بِكَلِمَاتٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
 أَنَا مَا لَجَلٌ، بَعْدَ مَا كَدْنَا أَحْقَابًا صَحَابًا بِالْجَمَلِ فَأَتَلَمَعَهُمَا لِلْمَا بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
 أَنَا هَلْفَارٍ سَعْدٌ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتِ كِسْرَى قَالَ «لَتَيْلِحَنَّ حَقُّهُمُورُوا أَمْرَهُمَا مَرَّةً»

⁴ Menurut Al-Farabi, pemimpin yang berkualitas harus memiliki syarat-syarat 1). Sehat anggota badannya. Tidak ada lagi panca indera seperti bisu, Putus salah satu jari dapat dikategorikan sebagai cacat 2). Tidak terganggu kualitas kepemimpinannya dan pemahamannya, 3). Tinggi ilmu dan pandai mengemukakan argumen dan dapat dimengerti pemikiran-pemikiran yang disampaikan, 5) Pencinta pendidikan, 6) tidak liba atau rakus dalam hal makanan, minuman dan wanita, 7) pencinta kejujuran dan pembenci kebohongan, 8) berjiwa besar dan berbudi luhur, 9) tidak mementingkan kekayaan dan kenikmatan duniawi, 10) pencinta keadilan dan pembenci perbuatan zalim, 11) tanggap dan tidak sukar diajak menegakkan keadilan, sebaliknya sulit untuk melakukan atau menyetujui tindakan keji dan kotor, 12) kuat pendirian terhadap hal-hal yang menurutnya harus dikerjakan, penuh keberanian, tinggi antusiasme, bukan penakut dan tidak berjiwa lemah atau kerdil.

⁵ Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." Lihat al-Quran Surat An-Nisa' ayat 34.

⁶ Dari Abi Bakrah, ia berkata, sungguh Allah telah memberi manfaat kepadaku dengan perkataan yang aku telah mendengarnya dari Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam - pada hari-hari (perang) Jamal (unta), setelah hampir saja aku ikut dengan pasukan unta lalu aku akan berperang beserta mereka. Dia berkata, ketika sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam (berita) bahwa penduduk Parsi sungguh telah menyerahkan kekuasaan atas mereka kepada puteri Kisra, beliau (Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam) bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan urusan mereka kepada seorang wanita. Lihat Shahih Bukhari no. 4425.

TOLERANSI

Media Umiah Komunikasi Umat Beragama

- ⁷ Lihat surat at-Taubah ayat 71.
- ⁸ Tutik Hamidah, *Fiqh Wanita Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang, UIN Maliki Press, 2011), p. 162.
- ⁹ Lihat Surat al-Isra' ayat 70.
- ¹⁰ Lihat surat an-Nisa' ayat 20-21.
- ¹¹ Artinya: "kaum wanita adalah saudara kandung laki-laki" Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Turmuzi. Sebagaimana dikutip oleh Tutik Hamidah, *Fiqh Wanita*, p. 30.
- ¹² *Sultanah* adalah istilah yang ditujukan kepada wanita-wanita yang menjadi *sultan* di kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia.
- ¹³ Para peneliti mengalami kesulitan untuk melacak riwayat awal kehidupan as-Sinkili, baik mengenai tahun kelahiran maupun latar belakang kehidupannya. Tidak ada penjelasan yang dapat dipercaya mengenai riwayat kehidupan as-Sinkili. Namun untuk tahun kelahiran, Rinkes menyatakan, yaitu pada sekitar 1024 H./1615 M. Menurut Liaw Yock Fang, as-Sinkili lahir di Singkel, sebuah kabupaten di Aceh Selatan. As-Sinkili diperkirakan meninggal pada tahun 1105 H./1693 M., dan dimakamkan di Kuala Krueng Aceh, sehingga kemudian terkenal dengan nama "Tengku di Kuala" atau "Syah Kuala". Snouck Hurgronje. *The Atjehers* (Leiden : E Brill, 1891) p.18. As-Sinkili memiliki nama lengkap 'Abd ar-Rauf bin 'Ali al-Jawi al-Fansuri as-Sinkili. Ia berasal dari Fansur di wilayah pantai-barat-laut Aceh. Ia adalah seorang ulama besar dan tokoh sufi dari Aceh yang pertama kali membawa dan mengembangkan tarekat Syatariyyah di Nusantara. Ayahnya adalah Syekh 'Ali al-Fansuri, seorang Arab yang setelah mengawini seorang wanita setempat dari Fansur, bertempat tinggal di Sinkel, tempat anak mereka, as-Sinkili, dilahirkan. Lihat akbarizan, *Peran Politik Ulama Sufi di Nusantara Abad XVII dan XVIII M.* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hal. 78.
- ¹⁴ Dikutip dari *Empat Sultanah Aceh Berdaulat* oleh Herman RN, *Makalah*, tidak dipublikasikan tahun 2011.
- ¹⁵ *Ibid.*
- ¹⁶ Menurut orang Inggris yang mengunjunginya tahun 1684, usianya ketika itu sekitar 40 tahun. Ia digambarkan sebagai orang bertubuh tegap dan suaranya lantang. Inggris yang hendak membangun sebuah benteng pertahanan guna melindungi kepentingan dagangnya ditolak Ratu dengan mengatakan, Inggris boleh berdagang, tetapi tidakizinkan mempunyai benteng sendiri. Lihat Wanita-wanita Aceh Tempo Dulu yang Perkasa, *Kabari*, 19 Maret 2008.
- ¹⁷ Ada pula yang menyebut *Ziatuddin*.
- ¹⁸ *Ibid.*
- ¹⁹ Cut Nyak Dhien yang dilahirkan tahun 1848 itu, tidak mengenal kata menyerah, ia berjuang dari jurang ke jurang, dari hutan ke hutan, bahkan setelah ia dibuang ke Sumedang, ia tetap berjuang dan wafat di pembuangannya.
- ²⁰ Lihat di dalam web dengan pencarian google dengan judul *Politik Identitas Wanita Aceh*, hal. 29.
- ²¹ Rida K Liamsi dilahirkan di Dabosingkep, Provinsi Kepulauan Riau, 17 Juli 1943. Rida K Liamsi yang bernama asli Ismail Kadir ini pernah menjadi Guru Sekolah Dasar pada rentang tahun 1967-1975 sebelum akhirnya terjun di dunia jurnalistik. Karir wartawannya dimulai ketika tahun 1972 ? 1973 sebagai wartawan Mingguan Pelita Buana. Pernah menjadi wartawan Majalah Tempo selama delapan tahun, di Harian Suara Karya lima tahun, sebelum pindah ke Harian Riau Pos yang terbit di Pekanbaru. Kini selain menjadi CEO Riau Pos Group yang mengelola kelompok bisnis media di bawah bendera Jawa Pos Group, juga menjabat Direktur PT JPNN di Jakarta. Group Riau Pos sendiri mempunyai bisnis media di Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan di Nanggroe Aceh Darussalam. Juga mempunyai beberapa TV local seperti Riau Televisi, Batam Televisi, serta Padang Televisi.
- ²² Dikutip dari tulisan Rida K Liamsi dalam www.rajaalihaji.com, pada tanggal 4 Nopember 2011.
- ²³ Lihat Monique Zaini-Lajoubert, Karya Sastera Melayu Moden yang Berilhamkan Karya Sastera Melayu Lama, *Makalah*, tidak dipublikasikan, hal. 7.
- ²⁴ Rida K Liamsi dalam www.rajaalihaji.com, pada tanggal 4 Nopember 2011.
- ²⁵ Namanya ketika dilahirkan adalah Raja Hamidah. Anak wanita pertama Raja Haji, Yang Dipertuan Muda Riau Lingga IV (1778-1874). Ibunya, adalah Raja Perak, puteri Daeng Kamboja, Yang Dipertuan Muda Riau Lingga III (1748 -1777). Daeng Kamboja, adalah anak Daeng Parani, saudara tertua dari lima bersaudara para pendekar Bugis Luwu yang datang merantau ke semenanjung (Daeng Prerani, Daeng Marewa, Daeng Celak, Daeng Manambun, Daeng Kemasi). Raja Ali Haji sendiri adalah anak Daeng Celak. Jadi mereka masih bersepupu. Begitulah perkawinan para keturunan bangsawan Bugis-Melayu di era kerajaan Johor-

- Riau-Lingga itu (1722-1912) diatur dan direkayasa, untuk menjaga panca kaki garis keturunan dan kekuasaan. Raja Hamidah adalah keturunan Melayu Bugis, generasi kedua. Generasi pertama adalah ayahnya, Raja Haji (anak Daeng Celak dengan Tengku Mandak). Karena itu mereka memakai gelar Raja. Tapi ibunya, Raja Perak itu (anak Daeng Kamboja), adalah isteri kedua dari Raja Haji. Isteri pertamanya adalah Tengku Lebar, anak Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Sultan Johor-Riau yang I (1722-1760). Dari perkawinannya yang pertama ini, lahir Raja Djaafar, yang kelak, menjadi Yang Dipertuan Muda Riau Lingga ke VI (1805-1831). *Ibid.*
- ²⁶ Mengenai Engku Puteri Hamidah ini dapat dilihat lebih lengkap pada karya Hasan Junus, *Engku Puteri Raja Hamidah: Pemegang Regalia Kerajaan Riau* (Riau: UNRI Press, 2002)
- ²⁷ Rida K Liamsi dalam www.rajaalihaji.com, pada tanggal 4 Nopember 2011.
- ²⁸ Menurut sumber dari beberapa naskah Melayu kuno dan teks-teks asing dalam buku ini, diceritakan bahwa *regalia* kerajaan atau alat-alat kebesaran dalam adat istiadat Melayu dianggap sakral atau keramat karena melambangkan kebesaran dan kekuasaan, penuh dengan kekuatan magis yang dapat mempengaruhi keadaan kosmos, menolak pelbagai bahaya seperti wabah, bencana alam, ataupun gejala masyarakat. Perangkat kebesaran ini adalah supremasi tertinggi bagi eksistensi sebuah kekuasaan, sebuah negeri, sebuah kedaulatan tidak akan sah dan berdaulat seorang Sultan, jika pelantikannya tidak menggunakan Regalia ini. Karena itu Pemegang Regalia itu, sekaligus juga adalah penjaga adat istiadat, dan tradisi. Di dalam kesatuan antara Regalia dan adat kebesaran budaya kerajaan itu, melekat marwah (kehormatan), harkat dan martabat kerajaan Riau Lingga. Jika rusak dan binasa kedua kekuatan spritual ini, maka hancur dan runtuhlah harkat dan harga diri bangsa itu.
- ²⁹ Hasan Junus, *Engku Puteri Raja Hamidah: Pemegang Regalia Kerajaan Riau* (Riau: UNRI Press, 2002), hal 47.
- ³⁰ Rida K Liamsi dalam www.rajaalihaji.com, pada tanggal 4 Nopember 2011.
- ³¹ Tengku Agung Sultanah Latifah menikah dengan Sultan Syarif Kasim di Langkat Sumatra Timur pada 27 Oktober 1912. Tiga tahun setelah menikah Tengku Agung dinobatkan sebagai Permaisuri Bergelar Sultanah, yang artinya kedudukan yang sangat tinggi, yang bisa menggantikan sultan bila sultan berhalangan.
- ³² Lihat Wilaela, Pendidikan Perempuan Riau (Sejarah Latifah School dan Diniyah Putri Pekanbaru), *Makalah*, yang dipresentasikan di Kogres Sejarah Nasional IX, Jakarta, Hotel Bidakara, 5-7 Juli 2011
- ³³ *Ibid.*
- ³⁴ Dikutip dari Wilaela, Pendidikan Perempuan Riau (Sejarah Latifah School dan Diniyah Putri Pekanbaru), *Makalah*, hal 6.